

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari Hasil Penelitian dan Analisis diatas sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari Indikator dibawah ini :

##### **1. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin**

Sesuai dengan data diatas dapat disimpulkan mengenai pemberian bantuan tidak ada 100% yang menerima, seperti di Kecamatan Patean yang seharusnya menerima tidak ada sama sekali atau 0%, tidak sesuai dan berbanding terbalik dengan Kecamatan Limbangan yang sebagian anaknya masih mendapatkan atau menerima haknya dalam pemberina bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Kabupaten Kendal dengan prosentasi 6.88%, Namun masih tidak sesuai yang diamanatkan oleh UUD bahwa sebagian 20% dana APBD untuk pembiayaan atau pendanaan dalam pendidikan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerimaan BSM untuk melaporkan kepada Dinas pendidikan Kabupaten Kendal.

##### **2. Hambatan yang terjadi dalam program Bantuan Siswa Miskin di Kabupaten Kendal**

###### **2.1 Faktor aturan Program**

- a. Kuota yang terbatas bagi siswa yang kurang mampu
- c. Ketetapan sasaran penerima BSM masih banyak rumah tangga yang masih digolongkan mampu.

###### **2.2 Faktor Pemerintah**

- a. Tidak adanya monitoring dan evaluasi

- b. Tidak adanya Pengawasan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan

### 2.3 Faktor Kebijakan sekolah

- a. Masalah pendataan yang sering tidak akurat, masih banyak yang tidak menerima
- b. Pencairan BSM yang langsung ke rekening siswa menyebabkan sekolah tidak mampu mengontrol penggunaan BSM yang diterima siswa
- c. Kurangnya keterlibatan Sekolah dan komite sekolah di dalam pengelolaan dana BSM yang diterima oleh siswa
- c. Kurangnya koordinasi Pemerintah dengan sekolah dalam pelaksanaan program BSM

### 2.4 . Faktor Koordinasi Pemerintah kepada sekolah

- Kurangnya sumber daya manusia yang memadai

### 2.5 Faktor Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya ketersediaan dana dan minimnya akses ke daerah-daerah terpencil
- b. Kurangnya Pengawasan dalam pengelolaan BSM
- c. Minimnya kegiatan untuk monitoring dan valuasi

## **B. SARAN**

1. Proses pendataan siswa penerima BSM hendaknya berasal dari bawah, misalnya melibatkan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Sekolah, bukan dilakukan dan ditentukan oleh pemerintah pusat agar meminimalisir kesalahan pendataan.

2. Sekolah dan komite sekolah seyogyanya dilibatkan dalam pengelolaan BSM yang diterima oleh siswa, misalnya siswa diminta untuk melaporkan penggunaan uang yang diterima dari BSM kepada dinas pendidikan kabupaten. Dengan demikian, BSM digunakan untuk kepentingan pendidikan siswa.

3. Meningkatkan kesadaran orang tua dan siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM sehingga dana BSM benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan sekolah.

4. Meningkatkan koordinasi Pemerintah serta antar pelaksana Program BSM yaitu lintas direktorat dan lintas lembaga (Kemendikbud dan Kemenag) serta menyosialisasikan program kepada masyarakat luas mengingat program ini baru dilaksanakan dan belum semua masyarakat mengetahuinya.

5. Masyarakat diharapkan melapor ke pihak yang berwenang apabila menemukan kasus penyelewengan dana BSM. Diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama bersinergi dalam mengawasi pelaksanaan program BSM ini, agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan semata.